

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA, KELEMBAGAAN DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Pada Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin)

Usulan Penelitian



Nama :Winda Winardi

NIM : 22 2012 029

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA KELEMBAGAAN DESA TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

(Studi Kasus Pada Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten
Banyuasin)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Winda Winardi

NIM : 22 2012 029

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2019

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA TANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa,
Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Nama : Winda Winardi
NIM : 22 2012 029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 2019

Pembimbing I



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM: 0216056801/851119

**Mengetahui,
Dekan**

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Winardi
NIM : 222012029
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul : Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa,
Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan MAsyarakat

Denga ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang yang telah di cantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 07, 08, 2019
Yang membuat pernyataan


Winda Winardi

Abtrak

Winda Winardi/222012029/Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Pada Desa Sungsang Kec, Banyuasin II Kab. Banyuasin)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Tiga Desa Sungsang di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Data yang diperoleh dari 61 responden. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuisioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Berpengaruh meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

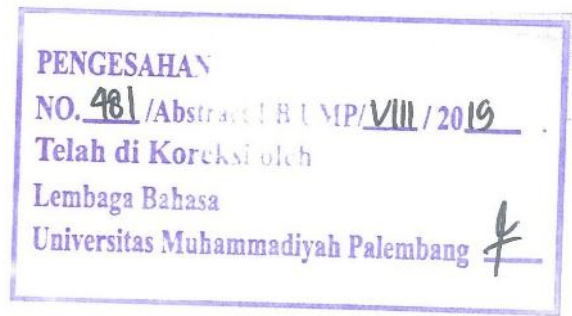
Kata Kunci: Alokasi Dana Desa

Abstract

Winda Winardi / 222012029 / The Influence of Management Accountability on Village Funds Allocation, Village Institutions Against Community Welfare

The objective of this study was to find out the influence of management accountability on village funds allocation, village institutions against community welfare at Tiga Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin. The type of this study was an associative study. The data used was primary data. Data obtained from 61 respondents. The data collection technique was using questionnaires. The data analysis methods used in this study were quantitative and qualitative analysis. The results of this study indicated that the accountability of Village Fund Allocation Management, Village Institutions influenced to improve Community Welfare.

Keywords: Village Fund Allocation



PRAKATA



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada abahku Eddy Fabe dan mamaku Aminah dan saudara – saudariku yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis: Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I saya dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku pembimbing II saya yang telah membimbing dan memberikah pengarahan serta saran – saran dengan tulus dan ikhlas, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis arti dari kesabaran dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,AK.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Wakil Ketua Program Studi Akuntansi
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Staf di kantor camat Banyuasin II dan kepala desa Sungsang I, II dan III yang dengan tulus membantu dan mengarahkan saya
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas – ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadahnya yang kita lakukan mendapat balasan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Juli 2019

Winda Winardi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	
HALAM JUDUL	
HALAMA PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PRAKATA	iv
HALAMAN DAFTAR ISI	vi
HALAMAN DAFTAR TABEL	
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	
A. Landasan teori	15
1. Akuntabilitas	15
2. Pelaporan Keuangan	17
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	19
4. Kelembagaan Desa	28
5. Kesejahteraan Masyarakat	28

6. Keterkaitan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat	31
B. Penelitian Sebelumnya	32
C. Kerangka Pemikiran	35
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Operasionalisasi Variabel	37
D. Populasi	38
E. Data yang Diperlukan	40
F. Metode Pengumpulan Data	41
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	42
1. Analisis Data	42
2. Teknik Analisis	43
a. Uji Validitas	44
b. Uji Reliabilitas	44
c. Uji Asumsi Klasik	45
d. Analisa Regresi Linear Berganda	46
e. Koefisien Determinasi	47
f. Uji Hipotesis	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Umum Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	50
2. Letak Geografis.....	51
3. Visi dan Misi Kecamatan Banyuasin II	52
4. Visi dan Misi Desa Sungsang I	53

5. Visi dan Misi Desa Sungsang II	54
6. Visi dan Misi Desa Sungsang III	54
7. Pertumbuhan Ekonomi .. ^{vii}	56
8. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamis	56
9. Tingkat Pengambilan Kuesioner.....	58
10. Hasil Pengujian Data	62
B. Uji Reabilitas	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan permasalahan masyarakat, hak dan asal usul, dan hak tradisional yang diakui, di hormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (NKRI). (Sujarweni, 2015 : 1). Desa merupakan sekelompok manusia atau orang yang membentuk sebuah kelompok yang saling berinteraksi sehingga dalam masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan agar ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian menjadi pedoman pada setiap warganya, sehingga dapat membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.

Masyarakat itu sendiri mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat terbuka yang biasa menerima perubahan yang terjadi dilingkungan masyarakat dan menggabungkan berbagai jenis kebudayaan yang sudah ada, dan sebaliknya masyarakat yang mempunyai sifat tertutup cenderung sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang ada karena mereka tidak terbiasa melakukan sesuatu yang mereka tidak pahami dan tidak biasa mereka jalankan, biasanya juga terjadi pada masyarakat yang masih tradisional dan tinggal di daerah pedesaan atau pegunungan.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Akuntabilitas kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberi pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2015 : 1).

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa kelembagaan desa yaitu organisasi pemerintah desa terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, dan badan kemasyarakatan desa. Badan permusyawaratan desa adalah organisasi yang menyelenggarakan pemerintahan yang anggotanya adalah masyarakat berdasarkan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan pendataan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentas kemiskinan, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2006 yang menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya dalam UU desa juga terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Alokasi Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera. Di bawah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diterima dari APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut kementerian Desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa berjumlah 1 miliar.

Peraturan pemerintah RI nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 Dana Desa adalah pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmono dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban dimaksud menyangkut finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai komponen didalamnya.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer

melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015: 18).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan alokasi dana desa, kebijakan adalah suatu keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kebijakan yang mengatur alokasi dana desa terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 dan PP No 60 tahun 2014 yang menyatakan bahwa dana desa akan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Desa atau Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Dwi (2014). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dikabupaten jember. Hasil penelitian penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa

diwilayah kecamatan umbulsari kabupaten jember sudah berdasarkan prinsip tanggungjawab dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penelitian kedua dilakukan oleh Suci dan Sugeng (2015) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitiannya yaitu proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2014, sistem pencatatan pemerintah dan pengeluaran kas belum dilakukan pemisahan dan seharusnya dilakukan pencatatan pada buku kas pembantu, dan manajemen keuangan sudah menunjukkan pelaksanaan akuntabel dan transparan dilihat dari laporan pertanggungjawaban APBDes.

I wayan (2016). Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa lambean kecamatan kintamani, kabupaten bungle tahun 2009-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan Hambatan yang dialami dalam merealisasikan alokasi dana desa pada desa lambean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, kurangnya komunikasi yang baik dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Menanggulangi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di provinsi sumatera selatan, Indonesia. Menurut legenda bahwa sungsang sudah ada sejak pertengahan Abad ke-17, setelah tahun 1955 Sungsang masih dalam bentuk Pemerintahan Marga. Sejak tahun 1988 berlakulah Undang-undang Nomor 1

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, berakhirnya Pemerintahan Marga, Sungsang dipecah atau di bagi menjadi 4 Desa yaitu Desa Sungsang I, II, dan III. Kecamatan Banyuasin II berada diwilayah timur Kabupaten Banyuasin, sebelah barat berbatasan dengan kecamatan lalan, dan kabupaten musi banyuasin, di sebelah timur berbatasan dengan laut selat Bangka (Prov. Bangka Belitung), sebelah utara berbatasan dengan provinsi Jambi dan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Makarti Jaya. Luas wilayah kecamatan Banyuasin II sebesar 3.688.2 Km. Kecamatan ini terletak lebih kurang 368.801.50 Ha. Dengan waktu tempuh lebih kurang 3 jam menggunakan *speedboat* kecil dan 1,5 jam menggunakan *speedboat* besar melewati lautan, dan 3 jam melewati kendaraan darat.

Desa Sungsang I merupakan salah desa yang berada di kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasian dengan batas desa sebelah utara berbatasan dengan Sungai Air Banyuasin, sebelahselatan berbatasan dengan Sungai Air Telang, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Marga Sungsang, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungsang II. Untuk akses transportasi umum masuk maupun keluar ke desa Sungsang I bisa melalui jalur Sungai Musi dan jalur darat dapat menggunakan motor dan mobil melalui jalan Tanjung Api-Api.

Tabel I.1
Profil Desa Sungsang I

No	Keterangan	Sungsang I
1	Jumlah warga desa	4.655
2	Jenis Kelamin: Laki-laki perempuan	2391 2264
3	Pendidikan Terakhir: TK/Paud SD SMP SMA Kuliah	20 orang 446 orang 191 orang 194 orang 23 orang
4	Mata Pencarian: Nelayan Pedagang Petani/ perkebunan Buruh Pns Perangkat Desa	802 kk 95 kk 107 kk 26 kk 4 kk 1 kk

Sumber :Penulis, 2019

Transportasi dari desa menuju kota kecamatan dapat ditempuh dengan mempergunakan transportasi darat becak motor atau berjalan, jarak dari desa menuju kota aatau kabupaten banyuasin yang terletak di daerah pangkalan balai sekitar 114 km dengan jarak tarik garis lurus dari desa Sungsang I menuju kabupaten dengan perjalanan darat 4 jam untuk menuju kabupaten. Jarak dari desa menuju ibu kota provinsi yaitu di kota Palembang sekitar 90 km, Sarana transportasi yang dipergunakan masyarakat menuju kota Palembang pada umumnya menggunakan transportasi sungai berupa *speedboat* dengan waktu

tempuh ± 2 jam sampai di pelabuhan Rumah Buruk Kota Palembang yaitu pada pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, sedangkan jadwal *speed boat* dari kota Palembang menuju desa Sungsang I yaitu pada pukul 16.00 WIB dan 18.00 WIB yang biayanya adalah Rp.70.000 per-orang dengan waktu tempuh ± 2 jam.

Tabel I.2
Profil Desa Sungsang II

No	Keterangan	Sungsang II
1	Jumlah warga desa	6.627
2	Jenis Kelamin: Laki-laki perempuan	3.334 3.293
3	Pendidikan Terakhir: TK/Paud SD SMP SMA Kuliah	36 orang 862 orang 113orang 296orang 29 orang
4	Mata Pencarian: Nelayan Pedagang Petani/ perkebunan Buruh Pns Perangkat Desa	914 kk 21 kk 1044 kk 210 kk 17 kk 3 kk

Sumber : Penulis, 2019

Transportasi dari desa Sungsang II menuju kota dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat becak motor atau berjalan, jarak dari desa menuju kota atau kabupaten banyuasin yang terletak di daerah pangkalan balai sekitar 184 km dengan jarak tarik garis lurus dari desa Sungsang II menuju

kabupaten dengan perjalanan darat 4jam untuk menuju kabupaten. Jarak dari desa menuju ibu kota provinsi yaitu di kota Palembang sekitar 90 km, Sarana transportasi yang dipergunakan masyarakat menuju kota Palembang pada umumnya menggunakan transportasi sungai berupa speedboat dengan waktu tempuh ± 2 jam sampai di pelabuhan Rumah Buruk Kota Palembang yaitu pada pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, sedangkan jadwal *speed boat* dari kota Palembang menuju desa Sungsang II yaitu pada pukul 16.00 WIB dan 18.00 WIB yang biayanya adalah Rp.70.000 per-orang dengan waktu tempuh ± 2 jam.

Table I.3
Profil Desa Sungsang III

No	Keterangan	Sungsang III
1	Jumlah warga desa	3.745
2	Jenis Kelamin: Laki-laki perempuan	1.932 1.813
3	Pendidikan Terakhir: TK/Paud SD SMP SMA Kuliah	128 orang 901 orang 408 orang 352 orang 26 orang
4	Mata Pencarian: Nelayan Pedagang Petani/ perkebunan Buruh Pns Perangkat Desa	819 kk 48 kk 83 kk 29 kk 5 kk 12 kk

Sumber :Penulis, 2019

Desa Sungsang III merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan banyuasin II kabupaten banyuasin dengan batas desa sebelah utara berbatasan dengan Sungai Air Banyuasin/pelabuhan tanjung siapi-api, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Upang Makmur Kecamatan Makarti Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungsang II, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungsang IV. Untuk akses transportasi umum masuk maupun keluar ke desa Sungsang III bisa melalui jalur Sungai Musi dan jalur darat dapat menggunakan motor dan mobil melalui jalan Tanjung Api-Api, Transportasi dari desa Sungsang III menuju kota dapat ditempuh dengan mempergunakan transportasi darat becak motor atau berjalan, jarak dari desa menuju kota aatau kabupaten banyuasin yang terletak di daerah pangkalan balai sekitar 190 km dengan jarak tarik garis lurus dari desa Sungsang II menuju kabupaten dengan perjalanan darat 4jam untuk menuju kabupaten. Jarak dari desa menuju ibu kota provinsi yaitu di kota Palembang sekitar 90 km, Sarana transportasi yang dipergunakan masyarakat menuju kota Palembang pada umumnya menggunakan transportasi sungai berupa speedboat dengan waktu tempuh ± 2 jam sampai di pelabuhan Rumah Buruk Kota Palembang yaitu pada pukul 10.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, sedangkan jadwal *speed boat* dari kota Palembang menuju desa Sungsang III yaitu pada pukul 16.00 WIB dan 18.00 WIB yang biayanya adalah Rp.70.000 per-orang dengan waktu tempuh ± 2 jam.

Pemerintah pembangunan desa melalui peningkatan layanan publik didesa, memajukan perekonomian desa, mengatasi pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek prioritas pembangunan desa

yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas pembangunan misalnya untuk jalan desa, sedangkan pemberdayaan masyarakat misalnya digunakan untuk pemberdayaan UKM desa.

Berikut ini tabel Alokasi Dana Desa pada tiga desa di kecamatan Banyuasin II:

Tabel I.4
Alokasi Dana Desa TA 2017/2018/2019
Kecamatan Banyuasin II

No	Desa	2017	2018	2019
1	Sungsang 1	250.285.412,00	259.960.412,00	375.368.981,00
2	Sungsang II	352.537,300,00	279.878.497,00	363.657.578,00
3	Sungsang III	243.464.623,00	251.171.762,00	383.967.556,00

Sumber: Penulis, 2019

Tabel I.5
Jumlah Kesejahteraan

No	Kesejahteraan Keluarga	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Ssg I	Ssg II	Ssg III	Ssg I	Ssg II	Ssg III	Ssg I	Ssg II	Ssg III
1	Prasejahteraan	695	137	49	692	135	47	689	133	45
2	Sejahtera I	205	45	608	199	44	605	197	43	603
3	Sejahtera II	85	15	287	82	13	285	80	12	283
4	Sejahtera III	37	8	17	34	7	16	33	6	15
5	Sejahtera III Plus	13	5	1	11	4	1	10	4	0
	Jumlah	1.035	210	962	1.018	203	954	1.009	198	946

Sumber: Penulis, 2019

Berdasarkan dari tabel I.4 adalah besar alokasi dana desa pada Tiga desa yang ada dikecamatan Banyuasin II Sungsang yaitu desa sungsang I, Sungsang II, Sungsang III. Berdasarkan Tabel I.5 adalah jumlah kesejahteraan masyarakat setiap tahunnya terus menurun Karena ketigadesa tersebut belum Nampak sejahteraan masyarakatnya, terlihat bahwa tidak banyak masyarakat mengetahui anggaran alokasi dana desa disetiap tahun dikarenakan kendala pemahaman masyarakat yang kurang terhadap penyaluran pendapatan dana yang diberikan pemerintah tersebut. Walaupun informasi yang diberikan pemerintah desa berupa papan pemberitahuan disetiap desa itu sudah ada tetapi penjelasan dari pemerintah desa sangat kurang sehingga masyarakat tidak tahu dan tidak paham atas penyaluran dana yang dilakukan pemerintah desa tersebut.

Pengalokasian Dana Desa tersebut diperlukan Badan Permusyawaratan Desa (BPDDes) sebagai badan pengawas agar danatersebut dapat disalurkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tiga Desa adalah salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat yang akan digunakan sebagai pembangunan, sesuai peraturan pemerintah Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 penyaluran Dana Desa ada 3 tahap, tahap yang ke I pada bulan April yang mana dana tersebut cair sebesar 40%, yang ke II pada bulan Agustus 40% dan yang terakhir pada bulan Oktober sebesar 20%.

Alokasi Dana Desa diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparat desa bersama masyarakat. Keterbukaan antar perangkat desa dengan masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan dana desa sangat kurang dan

menyebabkan kesejahteraan ketiga desa sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat Dan Daerah bisa membantu program desa dan tujuan Pemerintah terwujud demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin)”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba untuk menguraikan permasalahan yang ada. Untuk itu permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimanakah Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada tiga desa Sungsang di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada tiga desa Sungsang di Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman penulis mengenai pentingnya Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Bagi Kantor Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saifudin. 2016. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwi. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Vol.2 No. 3 2014.
- I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, kabupaten Bungli Tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Ekonomi Vol. 6 No. 1 2016.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik edisi kedua*. Penerbit UPP STIN YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 60 Tahun 2014. *Dana Desa*
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Permendagri Nomor 37 Tahun 2014. *Pedoman Penyusunan APBD*
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Suci dan Sugeng. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 4 No. 8 2015.
- Sugiono. 2016. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Penerbit PT Alfabet. Bandung
- Sugiono. 2017. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*. Penerbit PT Alfabet. Bandung
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Paper Plane. Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009. *Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Tentang Desa*